

## **ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**

***Arfah Habib Saragih***

*Universitas Indonesia, Indonesia*

*Email: arfah.habib11@ui.ac.id*

**Abstrak: Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.** Reformasi perpajakan daerah di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun. Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pembangunan daerah yang dapat diukur salah satunya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap IPM di Indonesia. Metode riset yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan unit analisis tiga puluh empat provinsi di Indonesia pada periode 2013-2016 dengan total 134 observasi. Data sekunder diolah melalui regresi data panel dengan metode random effect. Penelitian ini menemukan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Temuan lain yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan rasio gini berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM.

Kata kunci: Kata Kunci: pajak daerah, indeks pembangunan manusia, reformasi perpajakan, pertumbuhan ekonomi, rasio gini

**Abstract: An Analysis of Local Taxes Revenue's Effect on Human Development Index.** Regional tax reform in Indonesia has been ongoing for approximately twenty years. The aim of the tax reform is to increase regional revenues from tax which will be used society's welfare through regional development, which can be measured by Human Development Index (HDI). This study aims to analyse the effect of local tax revenue on HDI in Indonesia. Quantitative research method is used with unit of analysis of thirty-four provinces in Indonesia in 2013-2016, with a total of 134 observations. Secondary data is processed through panel data regression using random effect method. This study finds that local tax revenue has a significant positive effect on HDI. This study also finds that economic growth and unemployment rates have no significant effect on HDI, while gini ratio has a significant negative effect on HDI.

Keywords: local taxes, human development index, tax reform, economic growth, gini ratio

### **PENDAHULUAN**

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu tujuan dilakukannya reformasi perpajakan adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang

efektif dan efisien sehingga penerimaan negara dari perpajakan dapat meningkat signifikan. Peningkatan signifikan pada penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap pembangunan di seluruh Indonesia karena penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara maupun daerah, termasuk di dalamnya

pembangunan infrastruktur di berbagai lini dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Banyak pihak mengklaim bahwa reformasi perpajakan di Indonesia sudah cukup sukses karena dari sisi penerimaan pajak aktual telah melebihi penerimaan pajak yang ditargetkan dan semakin banyaknya wajib pajak yang terdaftar. Selama satu dekade terakhir, reformasi perpajakan semakin didukung dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan seiring dengan berkembangnya informasi, komunikasi, dan teknologi. Berbagai aplikasi teknologi terkait perpajakan gencar diciptakan dan disosialisasikan kepada para masyarakat dengan maksud mempermudah mekanisme pembayaran pajak. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan yang idealnya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara (Gebreegziabher, 2018).

Penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagian besar masih berasal dari sektor perpajakan. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini, tak terkecuali oleh pemerintah daerah melalui beberapa fase reformasi perpajakan daerah. Reformasi perpajakan daerah di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun. Reformasi ini berlangsung dalam tiga fase (Abuyamin, 2015). Fase pertama, dimulai sejak diresmikannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian fase kedua, diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Dan fase ketiga, dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pembangunan daerah.

Indikator keberhasilan dari satu reformasi mencakup birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki kualitas pelayanan publik yang baik (Kemenpan, 2015). Dalam hal ini, reformasi perpajakan daerah dapat dikatakan berhasil jika memenuhi ketiga indikator tersebut, bersih dari korupsi, mampu menciptakan prosedur perpajakan yang efektif dan efisien sehingga memudahkan para wajib pajak dalam membayar pajak, dan adanya peningkatan signifikan pada kualitas pelayanan kepada publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Terkait indikator pertama, pemerintahan daerah yang bersih akan menjamin optimalisasi penggunaan penerimaan pajak daerah untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Sementara itu, terkait indikator kedua dan ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari birokrasi perpajakan daerah, pemerintah daerah memiliki peluang yang luas untuk melakukannya karena pada saat ini perkembangan teknologi sangat pesat. Penggunaan teknologi berbasis internet dapat digunakan untuk mengembangkan sistem dan fasilitas yang akan memperbaiki kualitas pelayanan kepada publik dengan memberikan kemudahan bagi para wajib pajak memenuhi kewajibannya. Berbagai media berbasis internet juga dapat

digunakan sebagai sarana untuk menyosialisasikan perpajakan bagi masyarakat luas untuk sadar dan taat pajak.

Keberhasilan reformasi perpajakan di berbagai daerah ditandai dengan meningkatnya penerimaan pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh Gebreegziabher (2018) bahwasanya penerimaan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Mdanat (2018), ditemukan bukti bahwa tidak selamanya peningkatan penerimaan pajak menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena penerimaan pajak digunakan untuk mendanai *non-productive expenditures*. Apabila penerimaan pajak digunakan untuk mendanai aktivitas atau proyek yang produktif, maka akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Salah satu proksi yang digunakan untuk pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM pertama kali diumumkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Di Indonesia, data IPM disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut BPS, IPM adalah indikator strategis dalam mengukur keberhasilan suatu daerah atau negara dalam membangun kualitas hidup manusia (masyarakat), menggambarkan tingkat pembangunan suatu daerah/negara, dan merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah. Berdasarkan

data HDR tahun 2017, negara Norwegia berhasil menduduki peringkat pertama dalam hal IPM tertinggi dengan nilai 0,953. Sedangkan negara Indonesia menduduki peringkat ke-116 dari total 189 negara di dunia dengan nilai IPM 0,694. Peringkat dan nilai IPM tersebut cenderung tergolong masih rendah apabila dibandingkan dengan negara lain.

Terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap IPM, di antaranya: belanja daerah, proporsi non makanan, rasio ketergantungan dan *gini ratio* (Pratowo, 2012); pertumbuhan ekonomi (Khodabakhshi, 2011; Setiawan dan Hakim, 2013; Bhakti, Istiqomah, dan Suprpto, 2014); pengangguran (Chalid dan Yusuf, 2014); Pendapatan Asli Daerah (Setyowati dan Suparwati, 2012); serta Pajak Pertambahan Nilai (Setiawan dan Hakim, 2013). Berbagai faktor determinan tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menguji kembali secara empiris pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia pada periode 2013-2016, dengan mengambil unit analisis 34 provinsi di Indonesia. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena dapat menilai efektivitas reformasi perpajakan daerah (yang diproksi dengan penerimaan pajak daerah) dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah (yang diproksi dengan IPM daerah). Tahun 2013 dipilih sebagai awal periode penelitian ini karena berkaitan dengan peresmian provinsi baru di Indonesia, yaitu Kalimantan Utara. Tahun 2016 dipilih sebagai akhir periode penelitian karena semua data

yang diperlukan untuk riset ini telah lengkap memadai. Selain itu, variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan ekonomi, *gini ratio*, dan tingkat pengangguran.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerimaan pajak terhadap indeks pembangunan manusia? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan tersebut, yakni menguji pengaruh penerimaan pajak terhadap indeks pembangunan manusia. Signifikansi dan kontribusi dari penelitian ini di antaranya menambah literatur penelitian mengenai penerimaan pajak dan indeks pembangunan manusia di seluruh provinsi di Indonesia dalam empat tahun penelitian. Hal ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi para pembuat kebijakan baik di ranah perpajakan maupun di pihak pemerintahan mengenai keefektifan reformasi perpajakan daerah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah dan pembangunan daerah, serta menekankan pentingnya menggunakan penerimaan pajak untuk mendanai aktivitas atau proyek yang produktif demi tercapainya pembangunan daerah yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan tambahan tinjauan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh variabel kontrol pertumbuhan ekonomi, *gini ratio*, dan tingkat pengangguran terhadap IPM.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik, teori keagenan, landasan hukum perpajakan, teori reformasi perpajakan, serta beberapa indikator ekonomi makro. Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan yang

muncul dalam kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Kebijakan publik yang dilakukan pemerintah seringkali kurang berhasil dilakukan sehingga diperlukan evaluasi untuk memperbaikinya. Berdasarkan Dunn (1994), proses analisis kebijakan mencakup serangkaian aktivitas mencakup pembuatan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, penerapan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Melalui riset ini, akan diperoleh informasi apakah reformasi perpajakan daerah dinilai efektif atau tidak dari sudut pandang pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Teori yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) dan Zimmerman (1978). Dalam teori keagenan, terdapat beberapa pihak yang sepakat dalam melakukan kontrak, yakni pihak *principal* dan *agent*. *Principal* merupakan pihak yang memberikan wewenang, sementara *agent* adalah pihak yang dipercaya untuk diberikan wewenang oleh *principal*. Dalam praktiknya, antara *principal* dan *agent* tidak selalu sejalan, terkadang terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Konflik kepentingan yang termasuk fokus penelitian ini adalah konflik antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan daerah sebagai representasi dari pemerintah. Konflik ini terjadi karena wajib pajak berupaya untuk menghindari pembayaran pajak sedangkan pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak dari para wajib pajak dalam lingkup reformasi perpajakan. Apabila penerimaan pajak daerah telah melebihi

target yang ditetapkan, maka dapat dikatakan konflik keagenan cukup rendah karena para wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Rendahnya konflik keagenan ini akan berdampak positif pada penerimaan pajak yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi maju lebih pesat.

Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak daerah berdasarkan provinsi sebagaimana tertera dalam Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia pada 2013 hingga 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara pajak kabupaten terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Pemerintah Indonesia berencana untuk terus meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dengan menempuh langkah-langkah strategis demi tercapainya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

secara berkesinambungan (Kemenkeu, 2017), sebagaimana dinyatakan Langkah tersebut adalah pelaksanaan reformasi perpajakan dengan lebih baik; peningkatan pelayanan kepada wajib pajak; peningkatan efektivitas sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak; peningkatan ekstensifikasi, intensifikasi, dan penegakan hukum; peningkatan efektivitas pemeriksaan dan penagihan; peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal peningkatan kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan anggaran; pemanfaatan hasil kebijakan pengampunan pajak, yaitu perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak; serta pengidentifikasian dan penggalian potensi pajak yang didukung dengan program keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Kemenkeu, 2017).

Reformasi perpajakan mencakup perumusan kebijakan dalam bentuk peraturan dan pelaksanaan dari peraturan yang diarahkan untuk menghasilkan penerimaan pajak yang berkesinambungan. Berdasarkan Ott (2001) dalam Nasucha (2004) dua tugas utama reformasi perpajakan adalah mencapai efektivitas yang tinggi dan efisiensi yang seoptimal mungkin. Efektif dalam arti pemerintah daerah mampu menciptakan tingkat kepatuhan yang tinggi bagi para wajib pajak dan efisien berarti pemerintah daerah dapat mencapai biaya administrasi per unit penerimaan pajak sehemat mungkin. Reformasi perpajakan daerah di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun. Reformasi ini berlangsung dalam tiga fase (Abuyamin, 2015). Fase pertama, dimulai

sejak diresmikannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian fase kedua, diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Dan fase ketiga, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Pada kondisi ideal, penerimaan pajak yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, penerimaan pajak yang tinggi tidak selamanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula (Mdanat et al, 2018). Hal tersebut dapat terjadi karena penerimaan pajak tidak digunakan untuk mendanai proyek atau kegiatan yang produktif.

Riset mengenai pengaruh kemandirian fiskal terhadap pembangunan daerah beberapa kali juga telah dilakukan. Riset tersebut di antaranya dilakukan oleh Setyowati dan Suparwati (2012) yang menemukan bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh positif terhadap IPM. Sementara itu, Setiawan dan Hakim (2013) membuktikan secara empiris bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap IPM dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Kemandirian fiskal dapat diukur dengan pendapatan asli daerah, sedangkan pembangunan daerah dapat diproksi dengan indeks pembangunan manusia. IPM kali pertama dirilis oleh UNDP (*United Nations*

*Development Programme*) pada 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Di Indonesia, data IPM disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). IPM adalah indikator strategis dalam mengukur keberhasilan suatu daerah atau negara dalam membangun kualitas hidup manusia (masyarakat), menggambarkan tingkat pembangunan suatu daerah/negara, dan merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah, dan mencakup tiga dimensi mendasar (umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan/pendidikan, dan standar hidup layak (BPS, 2018).

Beberapa indikator strategis bersifat makro seperti laju pertumbuhan ekonomi, rasio gini, dan tingkat pengangguran juga dapat berpengaruh terhadap IPM. Penelitian mengenai faktor-faktor strategis yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia telah banyak dilakukan. Chalid dan Yusuf (2014) menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM. Pratowo (2012) dalam risetnya mengungkapkan bahwa belanja daerah dan proporsi non makanan berpengaruh signifikan positif terhadap IPM, sedangkan rasio ketergantungan dan *gini ratio* dan berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM. Sementara itu, Bhakti, Istiqomah, dan Suprpto (2014) menemukan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDB (GDP) berpengaruh terhadap IPM. Khodabakhshi (2011) juga menemukan bahwa PDB memiliki pengaruh positif terhadap IPM.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai penambahan kapasitas ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*, GDP) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Bruto Regional (*Regional Gross Domestic Product*, RGDPG) untuk tingkat daerah. RGDP adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto meliputi komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi, dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto (Badan Pusat Statistik Indonesia, diakses pada Oktober 2018).

*Gini Ratio* juga merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini karena telah banyak digunakan pada penelitian yang menjelaskan faktor-faktor determinan pembangunan suatu daerah/negara. Data GR dalam riset ini diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik. Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu

variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Jika Rasio Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika Rasio Gini bernilai 1 berarti telah terjadi ketimpangan sempurna (Badan Pusat Statistik Indonesia, diakses pada Oktober 2018).

Indikator makro strategis lainnya adalah tingkat pengangguran (*Unemployment Rate*). Tingkat pengangguran merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, di mana penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (BPS, 2018).

Berdasarkan hasil riset Chalid dan Yusuf (2014), dibuktikan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM sehingga variabel ini juga akan digunakan sebagai variabel kontrol dalam model penelitian.

## **METODE**

Secara umum, bagian ini menjabarkan metode riset dan pengembangan hipotesis yang digunakan untuk menjawab permasalahan riset. Populasi target dalam riset ini adalah semua provinsi di Indonesia dengan periode penelitian selama empat tahun, yakni 2013-2016 sehingga total observasi sebanyak 136 observasi (34 provinsi dalam 4 tahun). Akan tetapi, oleh karena Provinsi Kalimantan Utara baru diresmikan pada sekitar 25 Oktober 2012, ada dua data yang tidak dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara sehingga dikeluarkan dari

data riset. Sampel akhir yang digunakan berjumlah 134 observasi.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (2013-2016) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (2013-2016). Data sekunder tersebut diolah dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan bantuan *software* STATA dengan tingkat signifikansi 5%. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen penelitian yang akan digunakan berupa data keuangan dalam bentuk nominal dan skala/rasio. Untuk pengolahan data kuantitatif, peneliti akan menerapkan kaidah dasar dalam statistika dan ekonometrika, yang meliputi uji statistik deskriptif dan regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, lalu uji model secara keseluruhan dengan bantuan *software* STATA. Untuk mendapatkan gambaran awal data penelitian, penulis menggunakan analisis statistik deskriptif.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data

regresi data panel (*unbalanced panel data*). Data panel merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series* sehingga memiliki dimensi ruang dan waktu sekaligus. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode data panel karena beberapa keuntungan yakni memberikan heterogenitas; memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, kolinieritas antarvariabel menjadi lebih kecil, degree of freedom yang lebih besar, dan lebih efisien; lebih unggul dalam mempelajari perubahan dinamis; lebih unggul dalam mendeteksi dan mengukur pengaruh-pengaruh yang secara sederhana tidak dapat diobservasi dengan menggunakan data *cross section* murni atau *time series* murni; dapat digunakan untuk mempelajari complicated behavioral models; dan meminimalkan bias (Gujarati, 2004).

Berdasarkan permasalahan utama dan tujuan riset yang telah disebutkan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Penerimaan pajak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Adapun untuk variabel kontrol penelitian, tetap dilakukan analisis juga dengan hipotesis tambahan sebagai berikut:

Tabel 1. Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah Tahun-Provinsi
1.	Seluruh provinsi di Indonesia tahun 2013-2016	136 (34 provinsi x 4 tahun)
2.	Berdasarkan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi tahun 2013-2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), data penerimaan pajak daerah Provinsi Kalimantan Utara belum tersedia pada tahun 2013-2014 terkait masih baru diresmikannya provinsi ini sebagai provinsi termuda di Indonesia sehingga dikeluarkan dari sampel.	-2 (1 provinsi x 2 tahun)
Total Sampel Akhir		134

H2: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

H3: Rasio gini berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

H4: Tingkat pengangguran berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Untuk menguji hipotesis di atas, maka model penelitian yang dibangun adalah sebagai berikut:

$$\text{HDI it} = \beta_0 + \beta_1 \text{PTR it} + \beta_2 \text{RGDPGG it} + \beta_3 \text{GR it} + \beta_4 \text{OUR it} + \varepsilon \text{ it}$$

Keterangan:

HDI it = *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia/IPM) Provinsi i pada tahun t)

PTR it = *Province Tax Revenue* (Penerimaan Pajak) Provinsi i pada tahun t

RGDPGG it = *Regional Gross Domestic Bruto Growth* (Laju Produk Domestik Bruto Regional) Provinsi i pada tahun t

GR it = *Gini Ratio* (Rasio Gini) Provinsi i pada tahun t

OUR it = *Unemployment Rate* Provinsi i pada tahun t

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1$ -4 = Koefisien Masing-Masing Variabel

$\varepsilon$  it = Error Data Provinsi i pada tahun t

Berdasarkan model di atas, definisi operasional variabel dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. IPM adalah indikator strategis dalam mengukur keberhasilan suatu daerah atau negara dalam membangun kualitas hidup manusia (masyarakat), menggambarkan tingkat pembangunan suatu daerah/negara, dan merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah, dan mencakup tiga dimensi mendasar (umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan/pendidikan, dan standar

hidup layak). Data IPM diambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia.

2. PTR dalam hal ini adalah Pajak Daerah tingkat provinsi berupa pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data PTR dalam riset ini diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dirilis oleh Kementerian Keuangan dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik 2013-2016 dalam bentuk nominal dan dilogaritmanaturalkan untuk tujuan pengujian model penelitian.
3. RGDPG menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dalam hal ini adalah berdasarkan provinsi di Indonesia. Data RGDPG dalam riset ini diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik.
4. GR mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Jika Rasio Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika Rasio Gini bernilai 1 berarti telah terjadi ketimpangan sempurna. Data GR dalam riset ini diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik.
5. OUR (tingkat pengangguran) berupa persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, di mana penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (*Website* Badan Pusat Statistik Indonesia, diakses pada Oktober 2018). Data OUR dalam riset ini diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tabel 2 menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Terlihat bahwa rata-rata indeks pembangunan manusia (HDI) sebesar 68,2940 untuk periode 2013-2016. Angka tersebut mengindikasikan bahwa IPM Indonesia masih berada di kategori menengah untuk pembangunan manusia. Bila dibandingkan dengan negara lain, berdasarkan laporan UNDP PBB (2013-2016), peringkat Indonesia untuk tahun 2013-2016 berturut-turut adalah 108, 110, 113, dan 115 dari total 189 negara.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	Obs.	Mean	Std. Dev	Min	Max
HDI	134	68.29	4.20	56.25	79.60
PTR	134	27.88	1.26	25.61	31.08
RGDPG	134	5.65	2.40	-1.20	21.76
GR	134	0.37	0.04	0.28	0.44
OUR	134	5.19	2.04	1.64	9.65

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik yang diringkas pada Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa dalam rentang tahun 2013-2016, nilai IPM/HDI terendah 56,25 merupakan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua (BPS, 2013) dan tertinggi 79,60 adalah IPM Provinsi DKI Jakarta (BPS, 2016). Sementara itu, penerimaan pajak provinsi terendah bernilai 25,61 diperoleh Provinsi Sulawesi Barat (BPS, 2013) dan tertinggi bernilai 31,08 diperoleh oleh Provinsi DKI Jakarta (BPS, 2016). Provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah -1.20 adalah Provinsi Kalimantan Timur (BPS, 2015) sementara Provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi 21,76 diraih Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPS, 2015).

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Value	F-test that all	
	u <sub>i</sub> =0	Prob > F
	F(33, 96) =	
	204.38	0.0000

Untuk regresi model penelitian dengan data panel, dilakukan dengan software STATA. Pemilihan metode apakah akan menggunakan metode PLS, tetap, atau random dilakukan dengan Uji Chow (dengan hasil *fixed effect*) dan Lagrange Multiplier (dengan hasil *random effect*) seperti tertera pada Tabel 3 dan 4. Kemudian, dilakukan Uji Hausman untuk memutuskan metode yang terbaik untuk data ini. Berdasarkan hasil pada Tabel 5, metode yang dipilih adalah *random effect*.

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier

	chibar2	Prob > chibar2
Value	184.86	0.0000

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

	chi2	Prob > chi2
Value	7.63	0.1059

Tahapan selanjutnya adalah melakukan uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada Tabel 6, 7, dan 8. Berdasarkan nilai korelasi pada Tabel 6, terlihat bahwa tidak ada nilai korelasi yang berada di atas 0,80 yang artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas pada data penelitian.

Namun, berdasarkan Tabel 7 & 8 terdapat masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Kedua masalah ini, dapat diselesaikan dengan menambahkan *robust command* pada software STATA yang berarti

membersihkan data riset dari masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil regresi untuk model penelitian dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	HDI	PTR	RGDPG	GR	OUR
HDI	1.00				
PTR	0.56	1.00			
RGDPG	-0.24	-0.16	1.00		
GR	0.06	0.24	0.25	1.00	
OUR	0.35	0.38	-0.29	-0.01	1.00

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

	chi2	Prob > chi2
Value	1.8e+26	0.0000

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

	F (1, 32)	Prob > chi2
Value	173.481	0.0000

Tabel 9 menunjukkan hasil regresi akhir atas model penelitian dengan menggunakan metode *random effect* di mana HDI menjadi variabel dependen dan variabel lainnya adalah variabel independen. Langkah pertama, dari uji F statistik terlihat bahwa nilai probabilitasnya adalah signifikan pada level 5% yang artinya seluruh variabel independen (PTR, RGDPG, GR, dan OUR) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen HDI. Langkah berikutnya, uji kecocokan model (*goodness of fit*) dilihat dari nilai *adjusted R-square* yang bernilai 32,10%, yang artinya variasi dari HDI dapat dijelaskan oleh variabel dalam model (penerimaan pajak, laju pertumbuhan ekonomi, rasio gini, dan tingkat pengangguran) sebesar 32,10% sementara sisanya 67,90% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Tabel 9. Hasil Regresi Model Penelitian

Model:		
HDI it = $\beta_0 + \beta_1$ PTR it + $\beta_2$ RGDPG it + $\beta_3$ GR it + $\beta_4$ OUR it + $\varepsilon$ it		
Variable	Coef.	Prob.
C	-2.7220	0.774
PTR	2.7637	0.000*
RGDPG	-0.0341	0.267
GR	-15.0186	0.000*
OUR	-0.0408	0.514

N = 134; Ajd R<sup>2</sup> Overall = 32.10%; Wald chi2 = 404.29; Prob. = 0.0000\*  
\*significant at 5% level

Berdasarkan uji t statistik pada Tabel 9, dapat disimpulkan bahwa yang berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (variabel HDI) adalah penerimaan pajak daerah (H1 terbukti) dan rasio gini (H3 terbukti) dengan nilai probabilitas masing-masing  $0.000 < 5\%$ . Sementara itu, yang tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia adalah laju pertumbuhan ekonomi (H2 tidak terbukti) dan tingkat pengangguran (H4 tidak terbukti) dengan nilai probabilitas secara berurutan 0.267 dan  $0.514 > 5\%$ .

Penerimaan pajak provinsi ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan daerah yang diukur dengan indeks pembangunan manusia. Selama periode 2013-2016, rata-rata IPM provinsi di Indonesia berkisar pada 68,2940 yang mengindikasikan bahwa IPM Indonesia sudah berada di kategori menengah untuk pembangunan manusia relatif terhadap 189 negara berdasarkan laporan UNDP. Angka tersebut sudah cukup mendekati angka 70 yang berarti indeks pembangunan manusia tergolong pada kategori tinggi. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kontribusi yang lebih dari penerimaan pajak

daerah yang akan digunakan untuk pembangunan daerah.

Berhubungan dengan landasan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, kemungkinan penyebab signifikannya penerimaan pajak terhadap indeks pembangunan manusia akan dibahas menggunakan dua perspektif, yakni: efektivitas reformasi perpajakan dan teori keagenan. Apabila ditinjau dari efektivitas reformasi perpajakan daerah, berdasarkan hasil uji empiris pada riset ini maka dapat dikatakan sudah cukup efektif karena terbukti penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Tujuan dari reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Keefektifan pelaksanaan reformasi perpajakan di daerah menyebabkan target penerimaan pajak provinsi secara umum dapat tercapai yang pada akhirnya berimplikasi pada akan signifikannya pengaruh penerimaan pajak terhadap indeks pembangunan manusia. Kemungkinan penyebab berikutnya adalah sudah cukup baiknya penggunaan penerimaan pajak untuk mendanai proyek pembangunan atau infrastruktur yang berorientasi pelayanan publik dan produktif (yang mencakup layanan kesehatan, pendidikan, misalnya). Hal ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan untuk menjamin semakin baiknya indeks pembangunan manusia Indonesia.

Hasil temuan ini sejalan dengan hasil penelitian lainnya yang menguji pengaruh kemandirian fiskal terhadap indeks pembangunan manusia, di antaranya oleh

Setyowati dan Suparwati (2012) yang menemukan bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh positif terhadap IPM. Sementara itu, Setiawan dan Hakim (2013) membuktikan secara empiris bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap IPM dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Apabila ditinjau dari sudut pandang teori keagenan, konflik kepentingan yang termasuk fokus penelitian ini adalah konflik antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan daerah sebagai representasi dari pemerintah daerah. Konflik ini terjadi karena wajib pajak berupaya untuk menghindari pembayaran pajak sedangkan pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak dari para wajib pajak dalam lingkup reformasi perpajakan. Apabila target penerimaan pajak daerah cenderung dapat tercapai, maka dapat dikatakan konflik keagenan yang cukup rendah karena para wajib pajak sudah cukup baik dalam melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Cukup rendahnya konflik keagenan ini akan berdampak positif pada penerimaan pajak yang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah dan manusia Indonesia.

Berdasarkan Tabel 9, variabel kontrol yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia adalah rasio gini (dengan pengaruh negatif signifikan). Hal ini sejalan dengan hasil riset Pratowo (2012) dalam risetnya mengungkapkan bahwa *gini ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM, namun dua variabel kontrol lainnya, yakni laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran tidak berdampak signifikan bagi peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini

cukup berlawanan dengan hasil yang ditemukan oleh Chalid dan Yusuf (2014), Bhakti, Istiqomah, dan Suprpto (2014), dan Khodabakhshi (2011) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia dan Chalid dan Yusuf (2014) yang menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap IPM di Indonesia dengan unit analisis tiga puluh empat provinsi di Indonesia pada periode 2013-2016. Hasil utama yang diperoleh dari riset ini adalah penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada provinsi di Indonesia selama periode 2013-2016 pada level signifikansi 5%. Temuan lainnya adalah rasio gini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap IPM.

Implikasi dari temuan ini adalah pemerintah daerah telah cukup efektif melaksanakan reformasi perpajakan daerah dalam mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak demi dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak untuk kepentingan pembangunan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus menjaga dan meningkatkan efektivitas reformasi perpajakan daerah demi mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak agar dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak

untuk kepentingan pembangunan daerah. Penerimaan pajak sebaiknya juga dapat ditingkatkan penggunaannya untuk mendanai proyek pembangunan (infrastruktur) dan pelayanan publik yang produktif dengan tujuan peningkatan pembangunan manusia. Masyarakat sebagai wajib pajak juga dapat berpartisipasi dengan tetap menjaga kepatuhan dalam membayar pajak daerah/provinsi sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat dan signifikan untuk menjamin pembangunan daerah terkait.

Penelitian ini memiliki keterbatasan sekaligus sebagai saran penelitian ke depannya. Penelitian ini tidak mengidentifikasi lebih rinci mengenai struktur pajak daerah (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan lainnya) terhadap indeks pembangunan manusia sehingga pemerintah dapat memberi perhatian lebih pada jenis pajak yang kontribusinya tinggi terhadap IPM. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menginvestigasi hal ini secara lebih komprehensif (pajak provinsi dan pajak tingkat kabupaten) dengan tujuan agar kita dapat mengetahui kontribusi struktur pajak tertentu terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini juga hanya menggunakan data empat tahun 2013-2016. Rentang waktu yang lebih panjang (satu dekade terakhir) sebaiknya juga perlu diteliti karena dapat memberikan gambaran yang lebih umum mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap indeks pembangunan manusia Indonesia secara lebih mendalam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abuyamin, O. (2015). *Perpajakan: Dasar-dasar Perpajakan, KUP, PPh, PPN & PPnBM, PBB, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PPSP, Pengadilan Pajak, Pengantar Perpajakan Internasional*. Bandung: Mega Rancage Press.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2013*. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014*. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2015*. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2016*. Jakarta, Indonesia.
- Bhakti, Nadia Ayu., Istiqomah, & Suprpto. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Chalid, Nursiah., dan Yusuf, Yusbar. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Volume 22, Nomor 2 Juni 2014*.
- Dunn, William N. (1994). *Public policy analysis: an introduction*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
- Gebreegiabher S. (2018). *Effects of Tax and Government Expenditure on Economic Growth in Ethiopia*. Springer, Singapore.
- Gujarati, Damodar N. (2004). *Basic Econometrics (4th ed.)* McGraw-Hill: New York.
- Jensen, Michael C. and Meckling, William H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (2015). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019*.
- Khodabakhshi, A. (2011). Relationship between GDP and Human Development Indices in India. *Journal Department of Economics*, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran1(1):1-9.
- Mdanat, Metri Fayez., et al. (2018). Tax structure and economic growth in Jordan, 1980-2015. *EuroMed Journal of Business*, Vol. 13 Issue: 1, pp.102-127, <https://doi.org/10.1108/EMJB-11-2016-0030.s>
- Mustopadidjaya, AR. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: LAN.
- Nasucha, C. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo.
- Pratowo, Nur Isa. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*.

- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Setiawan, M.B. dan A. Hakim. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Economia*. 9(1), 18-26.
- Setyowati, Lilis., & Suparwati, Yohana Kus. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Prestasi* Volume 9 Nomor 1 Juni 2012.
- Watts, R., Zimmerman, J. (1978). Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards. Graduate School of Management, University of Rochester
- UNDP. (1990). Human Development Report 190. Oxford University Press. New York.